

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)**

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan RLPPD ini merupakan amanat dari Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 kepada masyarakat dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan juga sebagai media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa RLPPD memuat :

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	65,64	65,90	0,396
2.	Angka Kemiskinan	10,34	11,15	1,16
3.	Angka Pengangguran	69,54	68,18	-1,956
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-0,98	3,43	450
5.	Pendapatan Per Kapita (Juta)	20,122	20,855	3,653
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,343	0,378	10,204

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks

pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

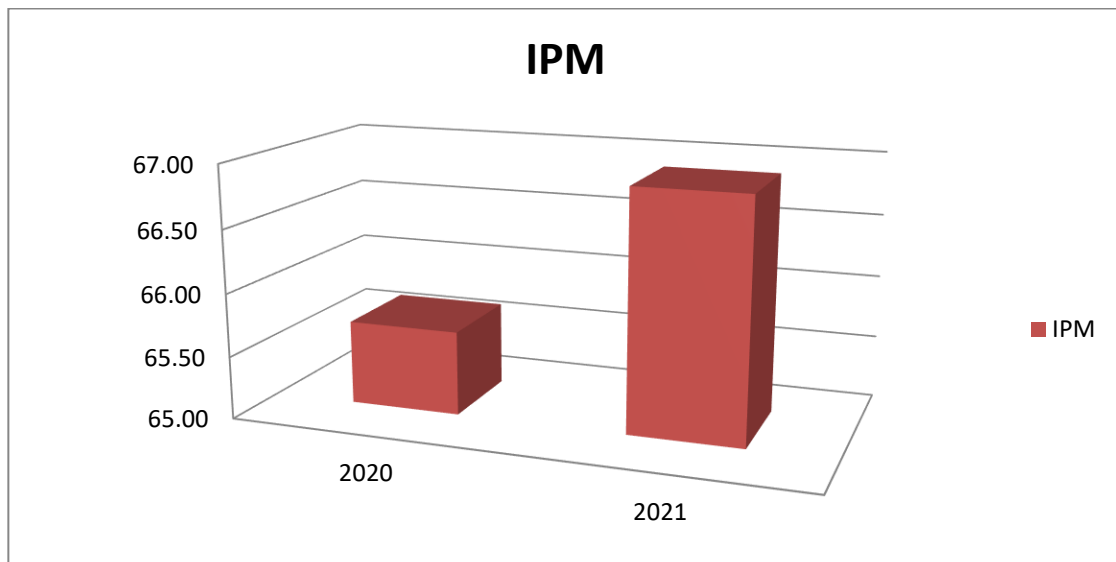
Tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 di tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 65,64. capaian IPM untuk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 yaitu 65,90 lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga IPM Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 0,396 % dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan pertumbuhan kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dari 65,64 tahun 2020 menjadi 66,90, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.2.

Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

b. Angka Kemiskinan

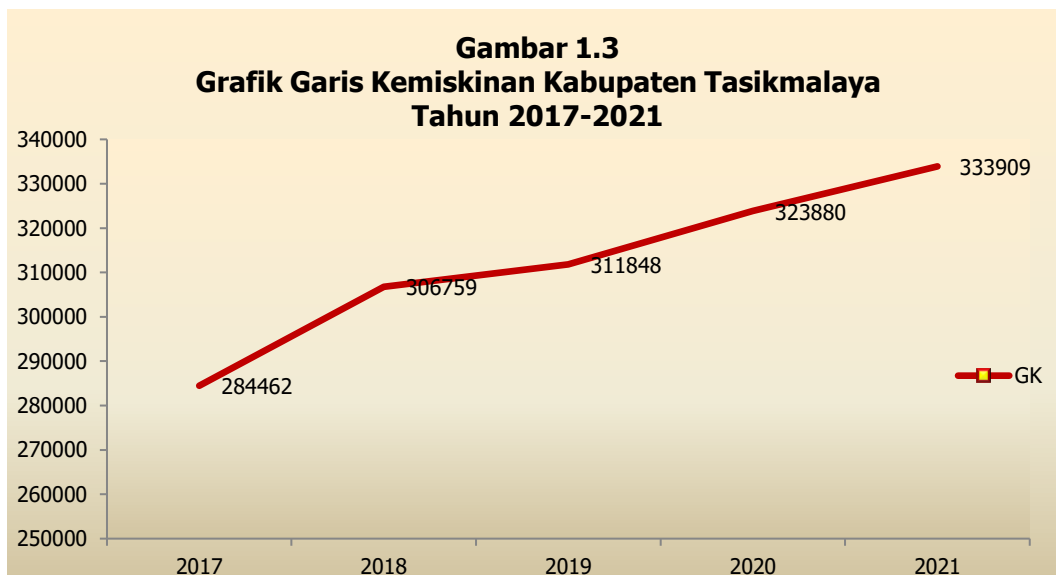
Dalam pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) menurut Survey Susenas BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pendekatan BPS ini dapat dikategorikan penghitungan kemiskinan absolut yaitu derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang-orang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsisten. Indikatornya sangat terukur, di mana ada standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sayogya, 1988). Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (Sayogyo, 1988).

Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu yang biasanya berupa jumlah atau nilai pendapatan dan unit uang. Namun ukuran bisa pula berbentuk jumlah konsumsi kalori, atau lainnya, yang memungkinkan adanya perbedaan jumlah atau nilai perbedaan pendapatan dalam unit uang. Parameter ini merupakan ukuran yang tetap dan kriteria pengukuran seperti itu diperoleh dari pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar.

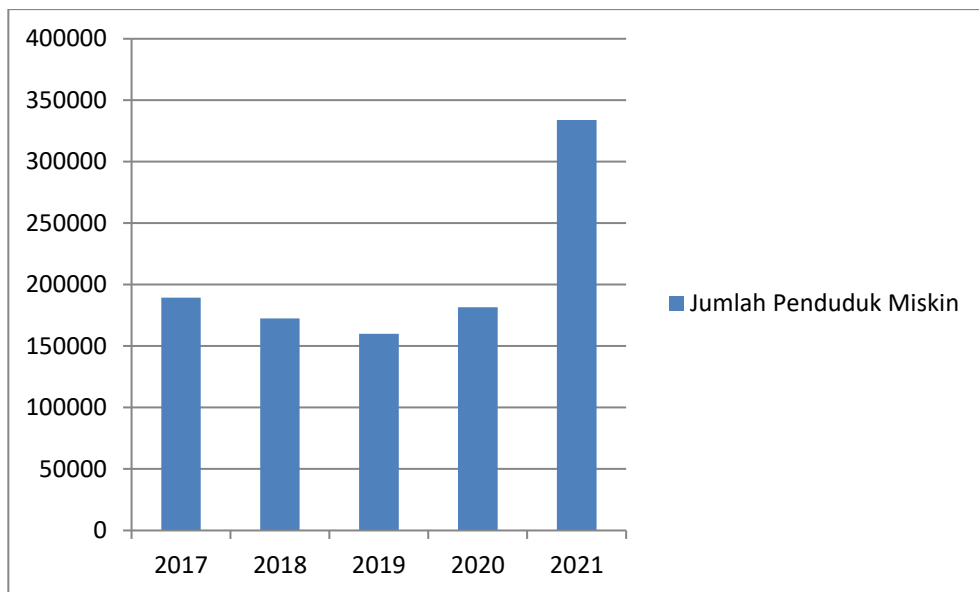


Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

Garis kemiskinan dalam kurun 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari Rp.323.880 pada tahun 2020 menjadi Rp.333.999 pada tahun 2021. Namun demikian persentase penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 10,84, menurun tahun 2018 menjadi 9,85, turun kembali pada tahun 2019 menjadi 9,12, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan akibat *vandemi covid-19* menjadi 10,32 dan tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi 11,15. Hal ini dikarenakan adanya bencana non alam berupa *pandemi Covid-19* yang berdampak ke sektor perekonomian dan sektor – sektor lainnya.

Penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya pun perkembangannya selaras dengan persentase penduduk miskin, dimana pada tahun 2017 jumlahnya 189.350 kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 172.410, menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 159.930 namun pada tahun tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 181.520 dan pada tahun 2021 penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya meningkat menjadi 200,590. Hal ini dikarenakan adanya bencana non alam yaitu pandemi Covid – 19. Adapun grafik perkembangan penduduk miskin tersaji pada Grafik 2.3 sebagai berikut :

Gambar 1.4.
Grafik Pertumbuhan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Tasikmalaya 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

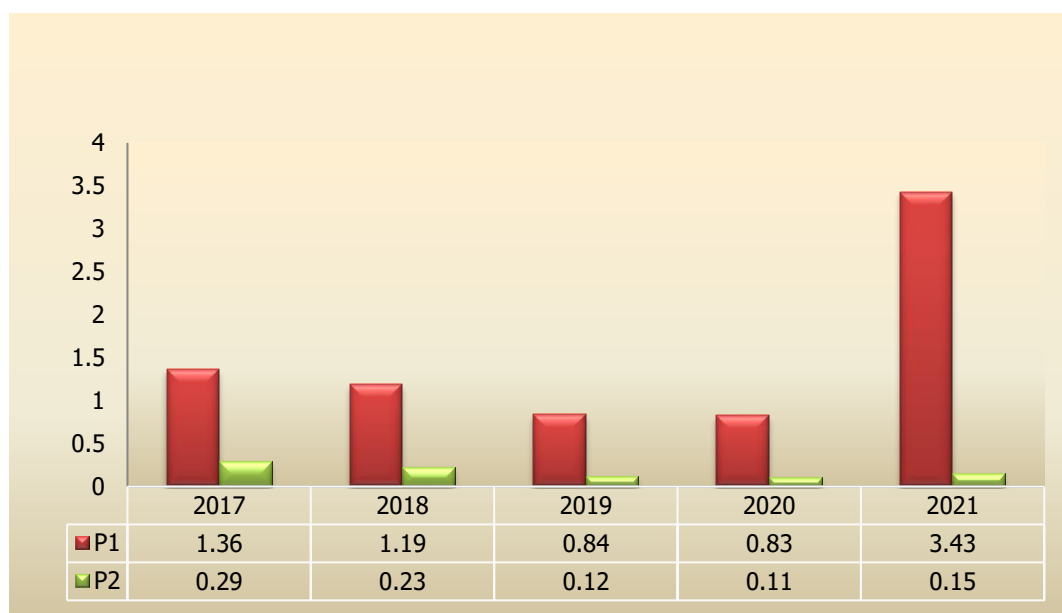
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 termasuk kedalam 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan capaian terendah. P2 berhasil diredam signifikan dari 0,11 pada tahun 2020 menjadi 0,15 pada tahun 2021.

Gambar 1.5.
Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Ishartono dan Raharjo (2016) menjelaskan isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai

persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

c. Angka Pengangguran

Angka kemiskinan diantaranya merupakan kontribusi dari jumlah pengangguran. Pengangguran itu sendiri dapat terbagi sebagai berikut :

1. Penganggur Terbuka terdiri dari :

1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagi mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari.

Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “ baru “, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan dimaksud adalah apabila “ **tindakannya nyata** “, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.
- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

2. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari :
 - a. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)

- b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

BPS Kabupaten Tasikmalaya mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 adalah 6,92 kemudian menurun menjadi 6,31 pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 7,12 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 6,12.

Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 dikarenakan adanya pemulihan setelah terjadinya bencana non alam Pandemi Covid – 19, dimana banyak sektor perekonomian yang mulai tumbuh, sehingga banyak perusahaan yang kembali membuka usahanya terutama pada sektor pariwisata.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dimensi sasaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu, dengan demikian PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.

PDRB ini dijadikan tolak ukur bagi pemerintah ataupun pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing – masing wilayah.

Tabel 1.6 di bawah menunjukkan struktur ekonomi secara kuantitatif yang dapat menggambarkan besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing – masing kategori terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan “*core business*” di Kabupaten Tasikmalaya.

TABEL 1.6.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR
HARGA BERLAKU TAHUN 2020 – 2021

NO	Kategori	PDRB harga berlaku	
		2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.155.600	14.777.110
2	Pertambangan dan Penggalian	88.760	88.330
3	Industri Pengolahan	2.854.810	3.003.520
4	Pengadaan Listrik, Gas	22.980	25.920
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	8.610	9.280
6	Konstruksi	2.900.240	3.240.480
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil & sepeda motor	6.807.150	7.144.880
8	Transportasi dan Pergudangan	1.580.380	1.613.980
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	535.910	544.390
10	Informasi dan Komunikasi	1.577.190	1.691.920
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.146.700	1.237.950
12	Real Estate	494.660	548.080
13	Jasa Perusahaan	162.320	177.470
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.480.540	1.462.900
15	Jasa Pendidikan	2.752.700	2.813.570
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	244.650	263.270
17	Jasa Lainnya	638.230	642.590
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.443.450	39.285.640

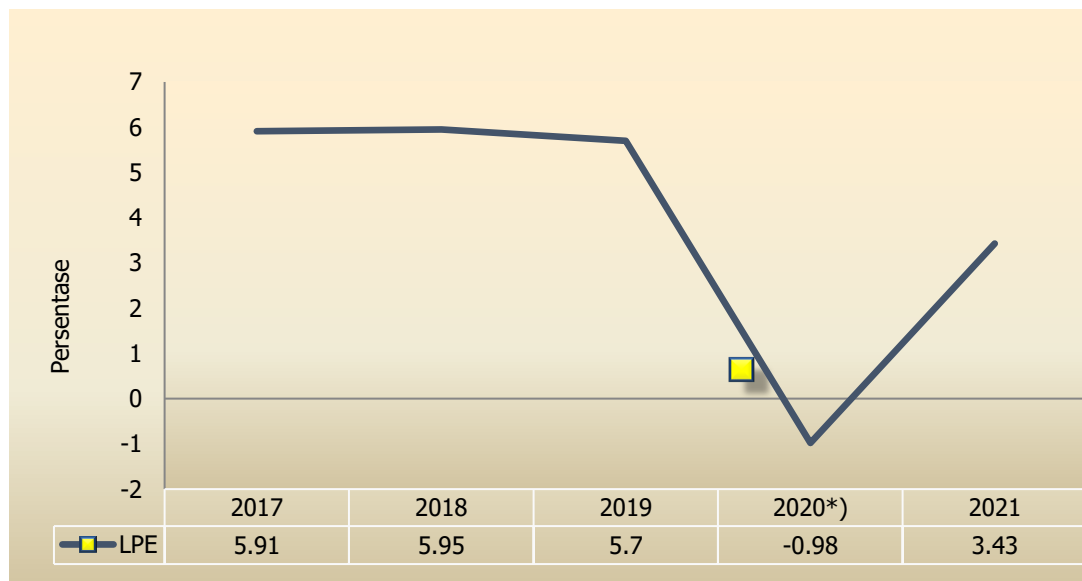
Sumber : Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2021

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah berbasis pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan. Hal

ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian terhadap penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 adalah sebesar 14.777.110

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar -0,98 % sedangkan tahun sebelumnya mencapai 5,7 % dan pada tahun 2021 menjadi 3,43 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami pluktuasi, sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Gambar 1.7
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Keterangan *) Angka Sementara

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bervariasi naik dan turun, dimana pada tahun 2017 yaitu 5.91 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.95, dan turun pada tahun 2019 menjadi 5.7 selanjutnya terus menurun pada tahun 2020 turun drastis menjadi -0.98 dan pada tahun 2021 naik menjadi 3,43, hal ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi Covid – 19, yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha.

Dilihat per sektor, pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh dari sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 12,34 %. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 yaitu sektor Jasa Perusahaan dimana pada tahun 2020 nilainya -14,98 dan meningkat 23,5 pada tahun 2021 menjadi 8,52.

Laju pertumbuhan PDRB yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi dan Jasa Pendidikan.

Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,55	5,2	3,23	-0,25	3,74
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,54	0,24	3,43	0,66	6,81
C	Industri Pengolahan	6,54	6,59	9,82	-2,15	2,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	3,76	4,96	-5,56	12,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,68	7,98	9,98	10,65	7,30
F	Konstruksi	5,57	7,84	7,60	-5,38	6,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,85	3,39	4,82	-7,43	3,10
H	Transportasi dan Pergudangan	6,11	6,49	5,67	-1,22	0,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,76	8,72	8,94	-2,29	-1,61
J	Informasi dan Komunikasi	14,45	12,65	9,97	26,14	7,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,34	4,07	4,09	0,78	4,61
L	Real Estate	2,74	9,97	10,17	1,08	10,64
M,N	Jasa Perusahaan	9,18	9,92	9,18	-14,98	8,52
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	0,91	1,91	-5,20	-1,92
P	Jasa Pendidikan	10,79	10,7	10,10	4,83	0,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,18	12,69	11,10	-3,68	5,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,46	13,46	12,10	-1,96	0,81

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,91	5,95	5,70	-0,98	3,43
--------------------------------	------	------	------	-------	------

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya (2021)

* Angka perkiraan sangat sementara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 Rp. 37,443 triliun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 33,970 triliun rupiah pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 39,285 triliun . sedangkan PDRB atas harga konstan pada tahun 2020 sebesar Rp. 24,344 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.23,319 triliun pada tahun 2019 dan tahun 2021 Rp. tercatat sebesar Rp. 25,179 triliun.

Hal ini, mengindikasikan tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus meningkat. Data perkembangan PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, tersaji dalam Tabel 1.9. di bawah ini :

Tabel 1.9
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017-2021
(Triliun Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019*)	2020**)	2021**)
PDRB Berlaku	27,995	30,532	33,970	37,443	39,285
PDRB Konstan	20,824	22,063	23,319	24,344	25,179

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

Keterangan **)Angka Sangat Sementara

*) Angka Sementara

Kehidupan perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya merupakan pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan. Hal ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian terhadap penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 sebesar 37,61 %. Meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tetapi sektor lain mengalami peningkatan diantaranya yaitu sektor industry pengolahan, sektor kontruksi, sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan.

Untuk lebih jelasnya peranan PDRB Kabupaten Tasikmalaya menurut kategori lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 1.10. dibawah ini.

Tabel 1.10
Peranan PDRB Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Kategori Lapangan Usaha (%), 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,35	38,02	38,09	37,81	37,61
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,25	0,23	0,22	0,22
C	Industri Pengolahan	7,42	7,43	7,56	7,62	7,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	7,74	7,89	8,05	7,75	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,23	19,74	19,20	18,18	18,19
H	Transportasi dan Pergudangan	4,30	4,33	4,30	4,22	4,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,30	1,33	1,43	1,39
J	Informasi dan Komunikasi	3,24	3,41	3,34	4,21	4,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,09	3,10	3,11	3,06	3,15
L	Real Estate	1,24	1,27	1,29	1,32	1,40
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,42	0,44	0,43	0,45
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,70	4,52	4,39	3,95	3,72
P	Jasa Pendidikan	5,62	6,04	6,23	7,35	7,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,58	0,62	0,64	0,65	0,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,47	1,59	1,70	1,70	1,64

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2021)

e. Pendapatan Per Kapita

Angka PDRB per kapita diperoleh dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2019 secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp.20,925 juta, Tahun 2020 Rp. 20,120 juta, dan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 20,855 juta.

PDRB per kapita merupakan *proxy* ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Artinya makin besar nilai pendapatan per kapita di suatu wilayah dapat diasumsikan bahwa nilai daya beli di daerah tersebut juga tinggi.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Ratio Gini*)

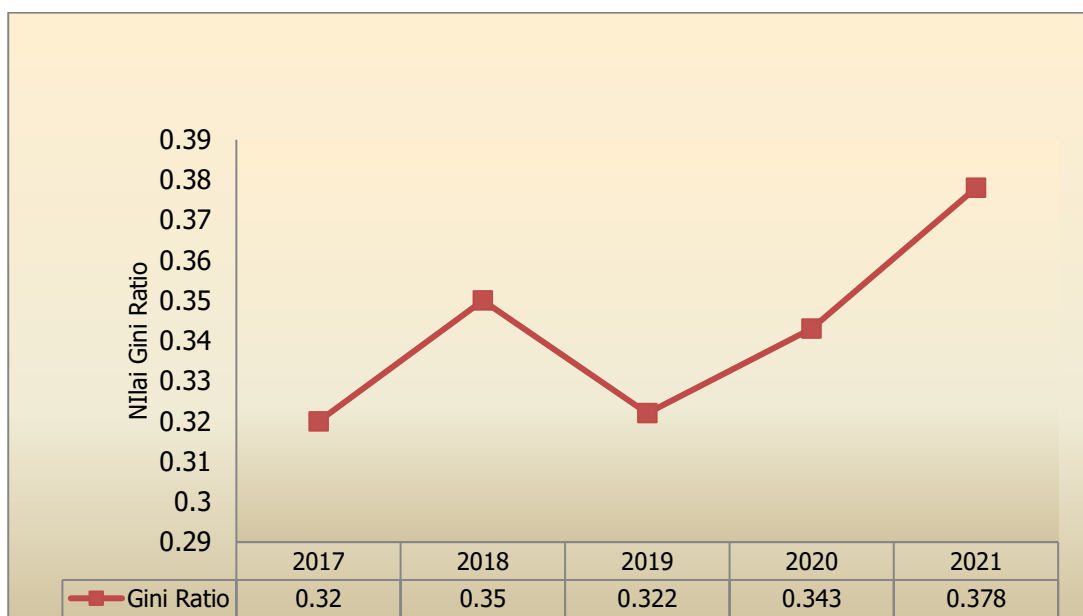
Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

- a. $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b. $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan

c. $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 berada pada 0,3 dengan kategori ketimpangan sedang, pada Tahun 2018 meningkat menjadi 0,353 dan Tahun 2019 menurun menjadi 0,322 dan tahun 2020 meningkat menjadi 0,343 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,378 artinya ketimpangan masih ada dan berada pada kategori sedang.

Gambar 1.11.
Grafik Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

2.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Berikut disampaikan capaian kinerja urusan pelayanan dasar di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 sebagai berikut :

No	URUSAN	No. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	No. IKK	IKK OUTPUT	CAPAIAN
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	72,483 %	1)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	288 lembaga
					2)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Siswa
					3)	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan	43.414 siswa
					4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	3.347 Orang
					5)	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	3.889 Orang
					6)	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2.830 Orang
					7)	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan	236 Orang

						pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,458 %	1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1.308 Sekolah
					2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.152 Siswa
					3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Siswa
					4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	154.501 Siswa
					5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	63.741 Siswa
					6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.894 Orang

					7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.082 Orang
					8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.769 Orang
					9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	3.888 orang
					10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.090 Orang
					11)	umlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	247 Oang
					12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	549 Orang
					13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	796 Orang
					14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.132 Orang
					15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.633 Orang

					16)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	765 Orang
					17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	162 Orang
					18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	549 Orang
					19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	796 Orang
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,007 %	1)	Jumlah Satuan Pendidikan kesetaraan terakreditasi	28 Sekolah
					2)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.054 Siswa
					3)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya	5.942 Siswa

						pendidikan	
					4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	770 orang
					5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	132 orang
					6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S-1)	65 Orang
					7)	Jumlah Kepala Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S-1, Sertifikat Pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	765 Orang
					8)	Jumlah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S-1	21 Orang
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan RS SMC: 241 RSIA Respati: 53 Total: 294	0,031 %	1)	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai Standar	20
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan Akreditasinya	20
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,937 %	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.793.745
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	884
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,786%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	88.602
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan	873

						persalinan sesuai Standar	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	103,976%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	121.777
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.245
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,256%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	294.528
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.182
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,763%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.757
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.667
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	42,058%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	413
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai Standar	40 Orang
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	73,109 %	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	342.619
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	100%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	376

			kesehatan sesuai standar				
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	376
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	88,182 %	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	270.500
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai Standar	40 Orang
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	52.526
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	56 Orang
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99.519	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50.496
					2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	40
3.	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	100 %	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1

			Kewenangan Kab/Kota				
					2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1
					3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1
					4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1
					5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	1
					6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	1
					7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota	1
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100 %			
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,818%	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	45,06

					2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	100 %
					3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100 %
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	76,66%	1)	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak Ada)	Ada
					2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak Ada)	Tidak
					3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM (Ada/Tidak Ada)	Ada
					4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1
					5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	48,912 %	1)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	161.956
					2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	161.956

					3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	247.067
					4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0
					5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0
					6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0
					7)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	418.679
					8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0
					9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	505.122
					10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0
					11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0
					12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0
					13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	4.481
					14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	1)	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	75%

					2)	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	131
					3)	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada
					4)	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak ada
					5)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada
					6)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada
					7)	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2 bangunan
					8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2 bangunan
		7	Tingkat Kematapan Jalan kabupaten/kota	65,006 %	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.303,32
					2)	Panjang jalan yang dibangun	0
					3)	Panjang jembatan yg dibangun	0
					4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0
					5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0
					6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	8.000
					7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0

					8)	Panjang jalan yang dipelihara	8,03 Km
					9)	Panjang jembatan yang dipelihara	0
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga ahli konstruksi di wilayah kabupaten/kota	225
					2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	225
					3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	225
					4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	4
					5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	4
					6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	4
					7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	4
					8)	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang	4

						sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	
					9)	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	4
					10)	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada
					11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	225
					12)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	225
					13)	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0
					14)	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0

					15)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
					16)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
					17)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
					18)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0
					19)	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0
					20)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0
					21)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0
					22)	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0
					23)	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,	0

						klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	
					24)	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
					25)	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %			
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	772,22 %	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	455051
					2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	349
					3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	KK = 1366 Jiwa = 3847
					4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	139
					5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada
					6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana	Tidak ada

						aksi	
					7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada
					8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	5243
					9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	0	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
					2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
					3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
					4)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
					5)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0

					6)	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	208,575 %	1)	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	15,81 Ha
					2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	53.561
					3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	7,58
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,604 %	1)	Jumlah rumah di kab/kota	505.122
					2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	53.561
					3)	Jumlah rumah tidak layak huni	53.561
					4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Tidak ada
					5)	Rasio rumah dan KK	76,88
					6)	Jumlah rumah pembangunan baru	Tidak ada
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	64.135 %	1)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	7666
					2)	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	11.953
					3)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	11.953
					4)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	11.953
					5)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak ada
					6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	11.953
					7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	81
					8)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	81
					9)	Jumlah pengembang yang	81

						mendapat penyuluhan atau Pelatihan	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab/kota	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	20 Kasus
					2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	9.744 Orang
					3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	67 Perda/Perkada
					4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 Orang
					5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 23 SOP
					6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada 130
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%			
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.873.704 JIwa	1)	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %
					2)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	226	1)	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 %
					2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %
					3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %

					4)	Persentase warga negara yang ikut Pelatihan	0,011 %
					5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0,20 %
					6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,20 %
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	350,700	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100 %
					2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %
					3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat Bencana	100 %
					4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96,296 %	1)	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	47
					2)	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak ada
					3)	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang	Tidak ada

						dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	
					4)	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada
					5)	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada
					6)	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	8 Orang
					7)	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Ada
					8)	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	5
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	26,67 menit			
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %	1)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1

					2)	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.750
					3)	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1
					4)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1.750
					5)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
					6)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.750 Orang
					7)	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
					8)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	50
					9)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	100
					10)	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	29
					11)	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang	3

					tersedia		
					12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	48
					13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	4
					14)	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	368
					15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	1.750
					16)	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	1.750 Orang
					17)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	45
					18)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1.281

					19)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	35
					20)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	35
					21)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	21
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	1)	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	8.174 Jiwa
					2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	8.174 Jiwa
					3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0
					4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	650
					5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1.394
					6)	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	52 TAGANA

A. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019, Kabupaten Tasikmalaya dengan skor 3,3149 meraih Status Kinerja Sangat Tinggi dan untuk tahun 2020 nilai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum turun sehingga nilainya belum bisa disajikan.

2) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	PENDAPATAN	3.273.859.775.435	3.241.569.559.918,50	99,01
1.1	Pendapatan Asli Daerah	428,182,630,516.00	375,030,394,259.50	87.59
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	89,383,145,412.00	75,360,502,247.00	84.31
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,874,182,998.00	5,150,543,572.00	52.16
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,446,283,298.00	23,193,457,737.00	81.53
1.1.4	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	300,479,018,808.00	271,325,890,703.50	90.30
1.2	Dana Perimbangan	2,010,265,721,237.00	2,036,322,383,520.00	101.30
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	156,062,480,132.00	153,469,596,821.00	98.34
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,375,992,285,000.00	1,375,992,285,000.00	100.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Fisik	132,780,732,000.00	122,403,568,111.00	92.18
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	432,734,471,504.00	432,789,189,841.00	100.01
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	184,282,400,000.00	185,158,932,740.00	100.48
1.3.1	Pendapatan Hibah	7,120,000,000.00	4,778,792,228.00	67.12
1.3.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7,120,000,000.00	4,486,194,500.00	63.01
1.3.4	Sumbangan pihak ketiga	0.00	292,597,728.00	0.00
1.3.5	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	184,282,400,000.00	185,158,932,740.00	100.48
1.3.6	Pendapatan Hibah Dana BOS	184,282,400,000.00	185,158,932,740.00	100.48
1	Belanja	3,380,157,314,414.00	3,163,518,750,156,00	93.59

1.1	Belanja Operasi	2,317,989,084,678.00	2,153,448,062,427.82	92.90
1.1.1	Belanja Pegawai	1,450,755,455,248.00	1,351,143,258,118.00	93.13
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	782,904,112,930.00	721,361,637,808.00	92.14
1.1.3	Belanja Hibah	84,329,516,500.00	80,943,166,500.00	95.98
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
1.2	Belanja Modal	285,920,529,495.00	239,410,778,173.00	83.73
1.2.1	Belanja Modal Tanah	19,040,675,350.00	16,001,585,000.00	84.04
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,112,598,317.00	80,344,113,610.00	86.29
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74,690,254,805.00	62,858,296,986.00	84.16
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58,570,684,387.00	55,317,239,010.00	94.45
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40,506,316,636.00	24,889,543,567.00	61.45
1.3	Belanja Tidak Terduga	33,897,874,625.00	30,599,444,557.00	90.27
1.3.1	Belanja Tidak Terduga	33,897,874,625.00	30,599,444,557.00	90.27
1.4	Belanja Transfer	742,349,825,616.00	740,060,465,000.00	99.69
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	9,925,732,841.00	8,074,504,000.00	81.35
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	732,424,092,775.00	731,985,961,000.00	99.94
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	117,797,538,979.00	117,876,412,772.96	100.07
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117,797,538,979.00	117,876,412,772.96	100.07
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11,500,000,000.00	-	-
2.1	Pemberian Pinjaman Daerah	11,500,000,000.00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	106,297,538,979.00	117,876,412,772.96	110.89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	195,927,222,535.46	-

Sumber : BPKPD Tahun 2021 (unaudited)

C. Inovasi Daerah

Inovasi daerah dan yang telah meraih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat Tahun 2021 adalah :

Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di UPTD Pendidikan Singaparna melalui *QR Barcode Learning*

Adapun rincian Inovasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	KETERANGAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rekaman Disabilitas Jompo dan ODGJ di Desa Terpencil (Rekdisamposansilk)	Sudah berjalan
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Dokumen Kependudukan Terpadu (PDKT)	Sudah berjalan
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP-el ke Sekolah dan Pesantren (Sweet-17)	Sudah berjalan
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Integrasi Perekaman Antar Kecamatan (INTAN)	Sudah berjalan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Perekaman dan Percetakan KTP-el (PERCET KTP-el)	Sudah berjalan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Pelayanan Keliling melalui Koordinasi Lintas OPD terkait (PEPELINGKOLOT)	Sudah berjalan
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melayani Daring Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (MEDARKACAPI)	Sudah berjalan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistim Informasi Antrian Cetak Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran Keliling (SIANAKKING)	Sudah berjalan
9	Desa Cikesal SD Cirangkong I	Stasiun TV Lokal Sekolah	Sudah berjalan
10	UPT Puskesmas Pagerageung	Jamban Idaman Masyarakat Tasikmalaya (JIMAT)	Sudah berjalan
11	Desa Cipakat (PAUD Sahara)	Diagnotic Reading Manajerial Sekolah Kreatif Inovatif dimasa Pandemi	Sudah berjalan
12	Desa Pageuageung	Rumah Sampah Berbasis Sekolah (RSBS)	Sudah berjalan
13	Desa Pageuageung	Pembinaan Rutin Seratus Guru (BIRUSERU)	Sudah berjalan
14	Desa Puteran	Sekolah Ibu	Sudah berjalan
15	Desa Pancamandala/Desa Papayan	Asap Air	Sudah berjalan
16	Desa Jamanis	: Bank Sampah	

17	Desa Melatisuka	: Tanaman Hias	
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	: SADASBOR	

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 merupakan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan kepada masyarakat sebagai realisasi tahunan dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021.

Pada hakekatnya, pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari adanya upaya berupa itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya lainnya.

Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website : www.tasikmalayakab.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat menyampaikannya melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufikNya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Singaparna, Maret 2022
BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO